

IMPLEMENTASI MODEL RICHARD MATLAND DALAM KEBIJAKAN HOME LEARNING DI KONDISI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo)

Nur Rezki Mochammad Sholeh¹, Slamet Muchsin², Hirsi Anadza³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia

LPPM Universitas Islam Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144 Indonesia

E-mail : 09mochammad@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan akar dari pembangunan sumber daya manusia guna menciptakan cita-cita luhur bangsa. Perkembangan teknologi memunculkan bentuk perubahan baru dalam sistem pendidikan. Berbagai sistem pendidikan telah diterapkan di Indonesia salah satunya metode pembelajaran yang dilakukan secara daring (home learning). Latar belakang adanya kebijakan pembelajaran secara daring (home learning) ini pada saat pandemi covid-19 yang melanda Indonesia. Adanya pandemi memunculkan sistem pendidikan baru bagi Indonesia termasuk Kabupaten Probolinggo juga ikut menerapkan pembelajaran secara daring. Dengan infrastruktur yang belum merata dan kondisi ekonomi masyarakat yang kebanyakan menengah kebawah memunculkan problematika dalam proses implementasi kebijakan daring (home learning) di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan home learning dengan menggunakan teori model Ricard Matland, serta faktor pendukung dan penghambat kemudian bentuk upaya Dispendik Kabupaten Probolinggo dalam menanganinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif (Interactive model) dari Milles dan Hubberman dan Saldana (2014). Dalam implementasi kebijakan home learning dengan menggunakan teori model Ricard Matland menghasilkan beberapa tahapan yang sudah sesuai diantaranya ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan lingkungan. Tetapi ada dua tahapan yang masih belum sempurna dalam bentuk implementasinya. Pertama, hasil implementasi home learning sepanjang pemantauan Dinas Pendidikan dirasakan kurang efektif karena beberapa kendala yang dialami pada saat melakukan pembelajaran secara daring. Kedua, dari ketepatan tagertnya pada saat penerapan kebijakan masih belum siap dalam menghadapi sistem pembelajaran secara daring.

Kata Kunci: Metode Pembelajaran, Model Ricard Matland, Implementasi

Pendahuluan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengarahkan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat dimana memuat arahan proses belajar dari rumah. Istilah home learning merupakan akronim dari daring (dalam jaringan) yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Menurut Bilfaqih & Qomarudin (2015:1) pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Thorne dalam Kuntarto (2017:102) pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD ROM, streaming video, pesan suara, email dan telepon konferensi, teks online animasi, dan video streaming online.

Dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dalam poin ke-2 tentang proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan; b. belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup; c. aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah; d. bukti atau

produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif.

Sejak di mulainya pembelajaran dari rumah atau daring Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo mengikuti aturan, dan arahan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Dilansir dari situs resmi <https://probolinggokab.go.id/> Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo kepada para Kepala SD negeri/swasta, Kepala SMP negeri/swasta dan Kepala PKBM melalui surat nomor: 420/1971/426.101/2020 Tanggal 24 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi mengungkapkan home learning merupakan implementasi dari prinsip merdeka belajar, khususnya dalam menghadapi masa darurat bencana Covid-19, sehingga peserta didik dapat menghindari kontak langsung dengan orang lain.

Namun dalam implementasi home learning ini tidak berjalan sesuai harapan. Banyak permasalahan muncul dalam proses pelaksanaannya. Berbagai kalangan mengeluhkan merasa kesulitan dalam melaksanakan belajar dari rumah, bahkan kebanyakan dari mereka ingin kembali belajar di sekolah. Selain itu, kendala yang dihadapi kondisi wilayah di Kabupaten Probolinggo yang beragam menyebabkan tidak semua wilayah terjangkau oleh layanan internet.

Hal tersebut senada yang diungkapkan oleh Siahaan (2005:40-4) hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau home learning atau daring diantaranya : a. Dari sisi peserta didik yang secara geografis terpencar-pencar mengakibatkan sangat sulit untuk dapat secara fisik bertatap muka dengan guru atau instruktur maupun dengan sesama peserta didik. Hambatan lainnya berupa keterbatasan finansial disamping motivasi disiplin belajar peserta didik yang menurun atau mengendor, b. Dari sisi guru atau instruktur sendiri berkembang pemikiran bahwa pemanfaatan teknologi canggih atau mutakhir seperti internet, menjadi beban tambahan atau merepotkan, c. Dari sisi ketersediaan bahan pembelajaran yang dapat diakses oleh para peserta didik melalui fasilitas infrastruktur yang tersedia akan menciptakan lingkungan belajar peserta didik yang kondusif.

Menurut Richard Matland (1995) untuk implementasi dalam birokrasi pemerintahan harus mengarah pada empat ketepatan agar hal keefektifan implementasi dalam home learning bisa terpenuhi salah satu diantaranya ada ketepatan target dimana target yang diintervensi sudah sesuai dengan yang direncanakan, kemudian apakah targetnya dalam kondisi siap, dan apakah implementasi lama siap untuk diperbarui.

Berlandasan dari kebijakan home learning dimana keadaan yang darurat mengakibatkan pendidikan yang semula melalui tatap muka atau offline menjadi online hal ini untuk memulai kebijakan baru dengan tatanan baru, sehingga keadaan ini membuat elemen pembuat dan pelaksana kebijakan mengalami ketidaksiapan dalam implementasinya.

Rumusan Masalah

Oleh karenanya, peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi model Richard Matland dalam kebijakan home learning di kondisi pandemi Covid-19 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam implementasi kebijakan home learning di kondisi pandemi Covid-19?

Tinjauan Pustaka Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris disebut policy dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor). Secara umum Budi Winarno (2008: 16) menyebutkan istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan).

Beberapa definisi yang berbeda mengatakan bahwa kebijakan publik dapat di tawarkan oleh Carl Freadrich (dalam Said Zainal Abidin, 2004: 21) yang mengatakan bahwa, Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Implementasi

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana alat untuk mencapai tujuan kebijakan (Tachjan, 2006:29). Implementasi kebijakan berorientasi pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga implementasi lebih ditekankan terhadap hasil luaran berupa penerapan atas hasil dari kebijakan yang telah dibuat.

Menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:146-147) implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan-

tindakan yang mencakup usaha-usaha dengan mengubah keputusan menjadi suatu tindakan operasional dalam waktu tertentu ataupun dalam rangka melaksanakan usaha dengan tujuan mencapai perubahan kecil dan besar yang telah ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi publik dengan mengarahkan suatu tujuan yang sudah ditetapkan.

Implementasi Model Ricard Matland

Richard E. Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Pada prinsipnya matrik matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Ketepatan Kebijakan
Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: (a) Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. (b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Ketepatan Pelaksanaan
Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan, misalnya: (a) Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. (b) Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. (c) Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.
- c. Ketepatan Target
Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang

direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. (c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

d. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu authoritative arrangement yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, network composition yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, implementation setting yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. (b) Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen yang terdiri dari public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institution yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individuals, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong (2002) dijelaskan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Nazir (1998: 63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok, manusia, objek, kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Model Richard Matland Dalam Kebijakan Home Learning Di Kondisi

Pandemi Covid-19 yang telah dilakukan dan dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dengan sub fokus:

- a. Ketepatan Kebijakan
 - b. Ketepatan Pelaksanaan
 - c. Ketepatan Target
 - d. Ketepatan Lingkungan
2. Faktor pendukung dan penghambat Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam implementasi kebijakan *home learning* dengan sub fokus:
- a. Faktor Pendukung Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam implementasi kebijakan *home learning* di kondisi pandemi covid-19.
 - b. Faktor Penghambat Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam implementasi kebijakan *home learning* di kondisi pandemi covid-19.

Lokasi dan Setting Penelitian

Lokasi yang diambil dari penelitian ini adalah di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan situs penelitian merupakan letak dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat serta benar-benar diperlukan dalam penelitian dan situs penelitiannya adalah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Sumber Data

Data Primer merupakan data yang diperoleh serta dikumpulkan penulis langsung dari sumber datanya. Sumber utamanya yang berupa wawancara dengan informan melalui kata-kata, tindakan, keterangan informasi yang dikumpulkan, serta mencatat kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Pendidikan sebagai data utama sebagai data pendukung peneliti lakukan di SDN Ngadirejo.

Data Sekunder merupakan data yang penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan, data sekunder dapat diperoleh dengan mengkaji serta mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dan juga peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009:137).

Teknik Pengumpulan Data

Pertama, wawancara merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dengan cara berinteraksi secara langsung dengan informan yang mengetahui permasalahan. Metode wawancara pada prinsipnya sama dengan metode angket. Kedua, observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis segala hal berkaitan

dengan lingkungan yang akan diteliti. Observasi atau yang sering disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Suharsimi Arikunto, 1996:199).

Ketiga, dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui pengambilan gambar sebagai bukti empiris guna mendukung terlaksana penelitian yang akurat. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati (Suharsimi Arikunto, 1996:201).

Instrument Penelitian

Menurut Meyer dan Greenwood (1984:339) mendefinisikan instrumen dikatakan sebagai alat yang digunakan oleh ahli analisis untuk mensistematisasikan pengumpulan data, dan instrumen yang baik harus valid dan reliabel. Adapun instrumen dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dalam memperoleh data serta informasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, yakni dengan melakukan observasi dengan lingkungan atau instansi terkait dengan melakukan wawancara beserta dokumentasi terhadap objek yang diteliti.
2. Pedoman wawancara, yakni dengan menyiapkan pertanyaan tertulis yang disusun dengan secara terstruktur untuk mendapatkan data yang akurat berupa tanggapan atau respon terhadap masalah atau fenomena yang diteliti.
3. Catatan lapangan, yakni digunakan sebagai alat atau saran bagi peneliti untuk mencatat seluruh informasi terkait sesuai hasil observasi dan pengamatan yang diperoleh peneliti selama proses berlangsungnya penelitian di lapangan.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) untuk menganalisis data hasil penelitian. Terdapat tiga langkah yaitu: Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, atau mentransformasikan data yang muncul dalam korpus lengkap (tubuh) catatan lapangan tertulis, wawancara transkrip, dokumen, dan materi empiris lainnya dengan memadatkan dan membuat data lebih kuat, tanpa mengurangi data. Tampilan Data. Secara umum tampilan diatur, perakitan informasi terkompresi yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan.

Bentuk tampilan yang paling sering untuk data kualitatif di masa lalu adalah teks yang

diperpanjang. Dalam pekerjaan kami, kami menjadi yakin bahwa tampilan yang bagus adalah jalan utama untuk melakukannya analisis kualitatif yang kuat. Aliran ketiga dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari awal data koleksi analisis kualitatif mengartikan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, sebab akibat arus, dan proposisi. Peneliti yang kompeten memegang kesimpulan ini dengan ringan, mempertahankan keterbukaan dan skeptisisme.

Teknik Keabsahan Data

Moloeng, (2011:324) mengatakan bahwa untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang berdasarkan dengan beberapa teknik pemeriksaan kriteria tertentu. Adapun 4 teknik pemeriksaan yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, yakni:

1. Kepercayaan (*credibility*)
2. Keteralihan (*transferability*)
3. Ketergantungan (*dependability*)
4. Kepastian (*Confirmability*)

Pembahasan

Implementasi Model Richard Matland Dalam Kebijakan Home Learning Di Kondisi Pandemi Covid-19.

Pada hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa implementasi kebijakan home learning dengan menggunakan teori model milik Richard Matland yang menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian birokrasi pemerintahan dan ini sangat berpengaruh kedalam bentuk implementasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo dalam kebijakan pembelajaran home learning. Pada teorinya implementasi model Richard Matland ini memiliki “empat tepat” yang harus dipenuhi dalam hal implementasi kebijakan, yaitu:

Pertama, yakni ketepatan kebijakan. Dikatakan ketepatan kebijakan hal ini dinilai dari beberapa indikator. Pertama sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah. Dari penjelasan di atas bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sudah mengikuti aturan atau arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan mengeluarkan surat edaran nomor 4 yang mengharuskan untuk menerapkan kegiatan pembelajaran dari rumah atau home learning maupun kebijakan SKB 4 menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi covid-19.

Sehingga adanya kebijakan home learning ini bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah dalam keadaan pandemi dan mencegah terjadinya kerumunan agar tidak ada penularan

covid-19 di warga sekolah sebagai kegiatan belajar dalam keadaan pandemi. Kedua, apakah kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Adanya kebijakan home learning ini tidak semata mengeluarkan kebijakan tersebut, tentunya dirumuskan sesuai dengan karakter masalah saat ini.

Adanya masalah pandemi covid-19 di Indonesia mengakibatkan pendidikan di Indonesia termasuk Kabupaten Probolinggo menerapkan pembelajaran melalui daring atau belajar dari rumah, walaupun kebijakan ini terbilang mendadak dalam implementasinya, karena memang harus ditetapkan untuk menjaga agar masyarakat sekolah baik guru maupun siswa tidak tertular oleh virus corona ini. Ketiga, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan sesuai dengan karakter masalah. Lembaga yang mempunyai kewenangan tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sebagai pembantu pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan & Kebudayaan dimana proses kebijakan tersebut dirumuskan dengan menerapkan 3 metode pembelajaran yakni, dalam jaringan (daring/home learning), luar jaringan (luring) dan campuran.

Kedua, yakni ketepatan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya pemerintah sebagai implementor kebijakan. Instansi daerah turut melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan juga bentuk kerjasama yang dilakukan daerah dengan pihak-pihak yang bisa membantu kebijakan home learning ini terutama partisipasi dari masyarakat. Dimana terdapat beberapa indikator juga dalam ketepatan pelaksanaan ini. Pertama, kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli artinya kebijakan home learning ini tentunya memiliki derajat politik keamanan yang tinggi dan untuk pencegahan virus covid-19 ini juga memiliki derajat politik keamanan tinggi.

Oleh karenanya, kebijakan keamanan covid-19 agar tidak merebaknya virus tersebut mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran home learning sehingga kebijakan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun di daerah agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Kedua, kebijakan ini apakah sudah memperhatikan aspek kesejahteraan bahkan memberdayakan masyarakat. Mengukur dari aspek kebijakan home learning di kondisi pandemi yang dibuat oleh pemerintah terhadap kesejahteraan bahkan memberdayakan masyarakat bisa dilihat bagaimana masyarakat atau orang tua yang mendadak menjadi guru bagi anaknya sehingga masyarakat dituntut untuk menggantikan sementara peran guru dan secara tidak langsung masyarakat akan menjadi ibu yang tangguh untuk anaknya.

Ketiga, kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat. Kebijakan home learning di kondisi pandemi ini membutuhkan peran serta masyarakat baik dalam menekan laju angka covid-19 agar tidak semakin tinggi dan membantu guru dalam kegiatan belajar anak selama di rumah. Sejak terjadinya pandemi, Dinas Pendidikan pun mengintruksikan kepada seluruh lembaga sekolah di Kabupaten Probolinggo sejak 16 Maret 2020 proses kegiatan pembelajaran sementara dilakukan dari rumah.

Hingga saat ini sepanjang pemantauan Dinas penerapan pelaksanaannya berjalan lancar dan mereka menggunakan akun pembelajaran berentuk google classroom, zoom, google meet bahkan whatsapp. Dinas Pendidikan juga melakukan koordinasi dengan korwil di tiap daerah mengenai kebijakan pembelajaran ini. Harapannya laporan dari masyarakat maupun guru dan kepala sekolah mengenai kendala yang terjadi bisa langsung termonitoring oleh Dinas dan segera mungkin dilakukan evaluasi.

Ketiga, yakni ketepatan target. Ketepatan target berhubungan dengan kebijakan yang diterapkan Dinas Pendidikan sudah tepat sasaran apa tidak. Terdapat tiga indikator dalam teori Richard Matland ini. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi. Ketiga, apakah implementasi kebijakan sifatnya memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Dari hasil data yang penulis dapat menunjukkan bahwa selama implementasi pembelajaran mulai daring maupun luring hingga tahap uji coba tatap muka untuk saat ini bisa dikatakan berjalan dengan lancar, memang selama prosesnya dan sampai hasilnya yang jelas pembelajaran home learning ini kurang efektif karena pendidikan itu merupakan bentuk transfer knowledge dan juga terdapat beberapa kendala.

Kemudian kebijakan home learning ini tidak bertentangan atau diintervensi dengan kebijakan lainnya sehingga kebijakan home learning sifatnya baru. Dalam penerapan kebijakan kondisi targetnya belum siap sehingga semua kerepotan baik itu guru maupun wali murid ditambah juga dengan keadaan pandemi yang semua serba terbatas dalam berkegiatan. Oleh karenanya Dinas Pendidikan menyikapi ketidakefektifan/ ketidakmaksimalan tersebut dengan melakukan bimtek secara digital setiap minggunya bagi semua guru di Kabupaten Probolinggo, sedangkan untuk masyarakat atau orang tua juga dihimbau untuk melakukan koordinasi dengan sekolah pada saat proses pembelajaran dilakukan dari rumah agar orang tua bisa menemani anaknya dalam hal belajar dan sekolah bisa memantau perkembangan belajar anak melalui orang tua.

Keempat, yakni ketepatan lingkungan dimana terdapat dua lingkungan yang menentukan

kebijakan. Pertama, lingkungan kebijakan/internal adalah interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan yang terkait. Dimana Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu authoritative arrangement yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan dalam hal ini kekuatan sumber otoritas dari kebijakan terdapat pada Kemendikbud yang selaku pemegang penuh dalam pembuat kebijakan dan kemudian dilaksanakan oleh daerah melalui Dinas Pendidikan dalam hal implementasi kebijakan home learning di Kabupaten Probolinggo.

Network composition yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sejak penerapan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo melakukan jejaring dengan dinas lainnya yang turut membantu dalam proses dan pelaksanaan kebijakan home learning diantaranya satgas covid-19 Kabupaten Probolinggo, Dinas Kesehatan, kecamatan, dan juga anggota dewan DPRD berupa pemberitahuan. Implementation setting yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.

Pengaturan implementasi ini kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan yang mempunyai hak penuh atas pelaksanaan kebijakan pembelajaran di Kabupaten Probolinggo sedangkan sebagai jejaring dalam kegiatan tawar menawar ialah sekolah yang menjalankan implementasi kebijakan pembelajaran ini di keadaan pandemi baik dengan Dinas Pendidikan maupun dengan wali murid siswa. Kedua lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Donald J. Calista sebagai variabel eksogen yang terdiri dari public opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institusion yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Bahwa dari data tersebut mengenai public opinion dan interpretive institusion yang paling banyak keluar dari perkataan masyarakat mengenai kebijakan pembelajaran selama pandemi ini yakni keinginan orang tua dan masyarakat agar sekolah bisa dibuka kembali. Hal itu dibuktikan karena ketidakmampuan orang tua dalam menemani dan mengontrol anaknya dalam hal belajar. Sehingga tanggapan kebanyakan dari masyarakat yakni keinginan orang tua siswa agar anaknya bisa belajar di sekolah lagi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Model Ricard Matland Dalam Kebijakan Home Learning

Dari implementasi kebijakan pembelajaran yang diterapkan Dinas Pendidikan tentunya membutuhkan faktor pendukung dalam menjalankannya. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan ini sangat mempengaruhi dalam keberhasilannya yakni berbagai instansi dari pemerintah daerah (bupati), satgas covid-19 yang turut bekerjasama dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran home learning di kondisi pandemi. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam pembelajaran home learning ini dikarenakan pemantauan orang tua terhadap perkembangan belajar dan mental anak akan sangat mempengaruhi siswa-siswi sekolah selama proses pembelajaran di keadaan pandemi.

Sementara itu, terdapat juga faktor penghambat dalam kebijakan pembelajaran ini berupa kurangnya fasilitas atau sarana prasarana di sekolah-sekolah Kabupaten Probolinggo, guru-guru yang kurang paham dengan teknologi saat ini, jaringan internet yang tidak mendukung siswa yang rumahnya berada di pelosok desa, orang tua maupun anak yang tidak memiliki hp dan mendukung untuk kegiatan belajar daring, dan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang notabene pekerjaannya petani sering kali mengeluhkan keadaan ekonominya ditambah keadaan pandemi ini. Hal ini mengakibatkan pemasukan dan pengeluaran tidak stabil sehingga orang tua kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak.

Kesimpulan

1. Peran Dinas Pendidikan terhadap implementasi kebijakan home learning di Kabupaten Probolinggo sudah dikatakan cukup baik. Hal ini bisa kita lihat dan pahami terdapat kebijakan atau aturan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sudah mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan. Begitupun dengan sekolah yang ada di Kabupaten Probolinggo juga mengikuti arahan yang diberikan Dinas Pendidikan, sehingga proses penerapan kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.
2. Dari teori model Richard Matland tersebut dari 4 ketepatan, 3 diantaranya sudah masuk/sesuai dalam teori tersebut dan ada 1 ketepatan yang dirasa belum berhasil dalam implementasi kebijakan home learning di Kabupaten Probolinggo yakni ketepatan target diantaranya permasalahan yang muncul pada saat proses berlangsungnya kebijakan tersebut ialah kurangnya fasilitas yang memadai dalam melakukan pembelajaran home learning, ketidaksiapan guru dalam memaparkan pelajaran melalui media teknologi, dan tidak mendukungnya peran serta masyarakat dalam

proses belajar anak selama di rumah. Tetapi Dispendik dan sekolah terus berupaya agar pembelajaran yang dilakukan dari rumah bisa berjalan baik dengan beberapa upaya yang dilakukan seperti melakukan pembelajaran dengan luring yang berbentuk komunitas, melakukan bimtek bagi guru, Dinas membantu sekolah dengan mengadakan beberapa fasilitas dan sekolah menyediakan gadget yang berbentuk kelompok agar anak bisa melakukan pembelajaran daring.

3. Faktor pendukung implementasi kebijakan home learning di Kabupaten Probolinggo yakni adanya dukungan kebijakan yang dikeluarkan Dispendik dari beberapa instansi seperti satgas, kementerian, bupati dalam melakukan metode pembelajaran dari rumah ini dan keterlibatan masyarakat untuk pembelajaran home learning ini. Kemudian faktor penghambat implementasi ini berupa sarana prasarana, jaringan internet kemudian anak yang tidak memiliki hp dalam proses pembelajaran home learning. Kemudian kurang tanggapnya atau kurang mengetahuinya guru terhadap IT sehingga masih perlu di bimbing lagi. Kesadaran masyarakat dalam mengontrol anaknya dalam belajar di rumah karena dinas maupun guru tidak bisa mengontrol anaknya untuk proses belajar di rumah. Dan mau tidak mau keluargalah yang berperan penting agar anak bisa memahami pembelajaran yang diberikan guru. Juga kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap bagaimana menjaga keluarganya untuk tidak berkerumun agar terhindar dari virus covid-19.

Saran

Pertama, diharapkan dari segi ketepatan targetnya yang tidak siap, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo lebih memperhatikan sekolah yang terkendala dalam segi infrastruktur atau fasilitas dengan penyempurnaan dan pengadaan fasilitas, kemudian juga adanya pandemi maupun tidak adanya pandemi sebaiknya Dispendik selalu melakukan bimbingan teknologi maupun bimbingan karakter terhadap kualitas seorang guru agar patut digugu dan ditiru oleh siswa.

Kedua, masyarakat harus lebih tanggap dan ikut berpartisipasi aktif dalam proses implementasi kebijakan home learning ini dengan menjaga dan mengontrol anaknya selama kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari rumah dan menjaga anaknya dari kegiatan perkumpulan agar terhindar dari virus corona, kemudian diharapkan masyarakat turut mengikuti sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo maupun sekolah agar lebih paham tentang kebijakan yang dibuat.

Ketiga, perlunya penelitian lanjutan. Penelitian ini masih didasarkan pada hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang menggunakan metode kualitatif. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode penelitian lainnya seperti metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data yang menggunakan alat ukur sehingga dapat membuktikan hasil hipotesis yang dibuat. Kemudian diharapkan untuk peneliti lainnya mengkaji dari segi efektifnya pembelajaran home learning ini agar terlihat perbedaan dari bentuk implementasinya maupun keefektifannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Yusuf Bilfaqih & M. Nur Qomarudin, (2015). *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring*, Ed. 1, Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish
- Kuntarto, E. & Asyhar, R. (2017). "Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning Pada Aspek Learning Design dengan Platform Media Sosial Online
- Thorne, K., (2003). *Blended Learning: How to Integrate Online & Traditional Learning*. London & Sterling, VA: Kogan Page Limited.
- Siahaan, Sudirman. 2005. "Pemanfaatan Teknologi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh". *Jurnal Teknodik*. Juni 2005. Nomor 16: 29-44. Jakarta: Pustekom Depdiknas.
- Suharsimi, & Arikunto. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Richard E Matland. (1995) *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation*. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, Vol. 5, No. 2 Apr, pp. 145-174.
- Moloeng, L. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya
- Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Winarno, Budi. (2008) *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Tachjan. (2006) *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- Muhammad Hamid. (2020). *Kemendikbud Sebut PJJ Tak Sama dengan Pembelajaran Daring dan Luring*, Artikel Pendidikan. Jawapos.com. 17 Juni 2020. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/17/06/2020/>, diunduh pada Juli 2020
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>, diunduh pada 15 September 2020
- Sikapi COVID-19, Kemendikbud Terbitkan Dua Surat Edaran. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/sikapi-covid19-kemendikbud-terbitkan-dua-surat-edaran>, diunduh pada tanggal 18 Oktober 2020
- Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 <https://probolinggokab.go.id/>, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2020
- Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. <https://pendidikan.probolinggokab.go.id/new/>. Diakses pada tanggal 01 November 2021
- Covid19.go.id
- Kemendikbud.go.id
- Pendidikan.probolinggokab.go.id
- Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020